



TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA

# SEKRETARIAT

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN



**Gedung Mina Bahari III, Lantai 6 & 7,**  
Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110



**Phone Number**  
021 3519070 (Hunting), Fax : 021 3513287



**E-mail**  
bppsdm@kkp.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat BPPSDMKP sampai dengan akhir tahun 2024 yang mengacu pada standar sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai alat penilai kinerja kuantitatif, laporan kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP menuju terwujudnya *good governance*, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Kami berharap, seluruh Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 juga mampu tergambarkan secara utuh.

Alhamdulillah hirobbil alamin, dengan selesainya laporan ini kami ucapkan terima kasih atas sumbangsih semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP. Kami berharap laporan ini berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya.

Jakarta, 20 Januari 2025  
Sekretaris BPPSDMKP,



Dr. Rudi Alek Wahyudin, S.Pi.,M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) .....	4
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA .....	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	7
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	7
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2024.....	9
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	11
2.4. PENGUKURAN KINERJA .....	17
2.4.1. Teknik Penghitungan .....	17
2.4.2. Tata Cara Pengukuran Kinerja .....	17
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	21
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	84
3.4. EFISIENSI ANGGARAN SEKRETARIAT BPPSDMKP.....	84

Bab IV. PENUTUP .....	88
4.1. KESIMPULAN .....	88
4.2. REKOMENDASI .....	90
LAMPIRAN .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMKP 2024 .....	7
Tabel 2. Sandingan PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 .....	13
Tabel 3. Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 .....	15
Tabel 4. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 (revisi III) .....	15
Tabel 5. Status Indeks Capaian IKU .....	17
Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 .....	21
Tabel 7. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) .....	24
Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK .....	25
Tabel 9. Capaian Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK per Tahun .....	26
Tabel 10. Unit Kerja yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM .....	28
Tabel 11. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM .....	31
Tabel 12. Perbandingan Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Tahun 2023 .....	31
Tabel 13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks) .....	32
Tabel 14. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (indeks) Tahun 2023 .....	33
Tabel 15. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai) .....	34
Tabel 16. Perbandingan Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai) Tahun 2023 .....	34
Tabel 17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (nilai) .....	36
Tabel 18. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM .....	38

Tabel 19. Perbandingan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023 .....	38
Tabel 20. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%).....	41
Tabel 21. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%) .....	42
Tabel 22. Perbandingan IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Tahun 2023 .....	43
Tabel 23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%).....	44
Tabel 24. Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM .....	46
Tabel 25. Perbandingan Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2023.....	46
Tabel 26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM .....	48
Tabel 27. Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%) .....	50
Tabel 28. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%).....	52
Tabel 29. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 ..	53
Tabel 30. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%) .....	55
Tabel 31. Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Milyar) .....	58
Tabel 32. Perbandingan Nilai PNBPN (Rupiah Milyar) Tahun 2023.....	58
Tabel 33. Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Milyar) .....	60
Tabel 34. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (Orang).....	61
Tabel 35. Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Orang) ..	62
Tabel 36. Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan).....	64
Tabel 37. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%) .....	65



Tabel 38. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%) .....	66
Tabel 39. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%) .....	68
Tabel 40. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai) .....	70
Tabel 41. Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) Tahun 2023.....	70
Tabel 42. Indeks Perencanaan Program (Indeks) .....	72
Tabel 43. Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks).....	73
Tabel 44. Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai) .....	74
Tabel 45. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Indeks) .....	76
Tabel 46. Satuan Kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (Satker) .....	78
Tabel 47. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM.....	79
Tabel 48. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%) .....	80
Tabel 49. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.....	82
Tabel 50. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%) .....	83
Tabel 51. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024.....	84
Tabel 52. Efisiensi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 .....	85
Tabel 53. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 .....	89

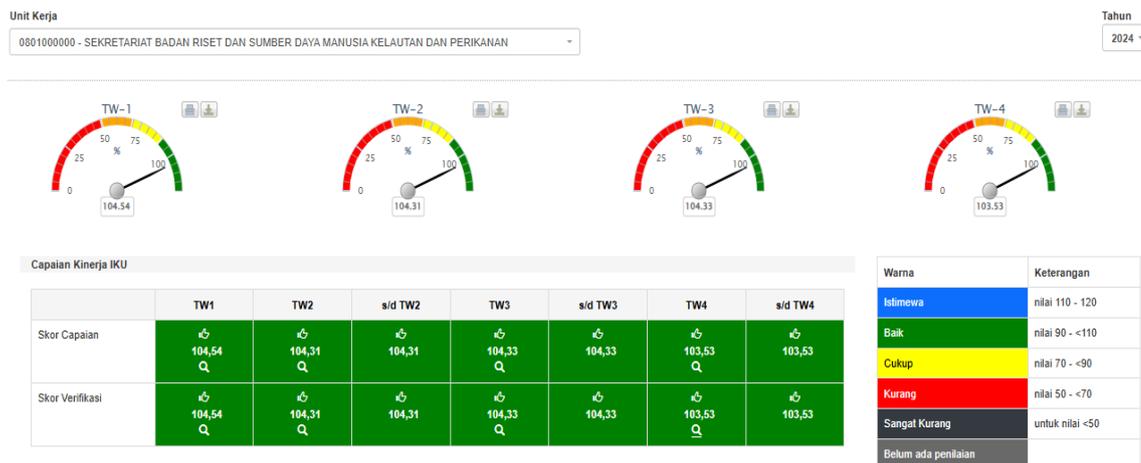
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM KP Tahun 2024.....	viii
Gambar 2. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024.....	4
Gambar 3. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024.....	20
Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024.....	88

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat BPPSDM KP selain sebagai koordinator kinerja pada Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, dan Pusat Pendidikan, juga sebagai Unit Organisasi Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT yaitu: Balai Riset Perikanan Laut; Balai Riset Budidaya Ikan Hias; Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan; Balai Riset Pemuliaan Ikan; Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil; Loka Riset Perikanan Tuna; Loka Riset Budidaya Rumput Laut; Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Dengan tugas yang dibebankan tersebut, Sekretariat BPPSDM KP harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh capaian kinerja UPT di lingkungannya.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDM KP tahun 2024 telah menggunakan PK Sekretariat BPPSDM KP terakhir, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 102,77 menjadi 103,53, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDM KP Tahun 2024

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2024

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) dengan target 17 unit, telah tercapai 19 unit, atau 111,76%.
2. Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM dengan target 6 unit, telah telah tercapai 8 unit, atau 120%.

3. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM dengan target nilai  $\leq 0,50\%$ , telah tercapai  $0,14\%$ , atau  $120\%$ .
4. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM dengan target indeks 85, telah tercapai dengan indeks  $88,40$ , atau  $104\%$ .
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM dengan target nilai 81, telah tercapai dengan nilai  $88,79$ , atau  $109,62\%$ .
6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM dengan target nilai 94, telah terealisasi dengan nilai  $96,10$ , atau  $102,23\%$ .
7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM dengan target nilai  $3,30$ , telah tercapai dengan nilai  $3,75$ , atau  $113,58\%$ .
8. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target  $94\%$ , telah tercapai sebesar  $115,28\%$ , atau  $120\%$ .
9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM dengan target  $82\%$ , baru tercapai  $81,31\%$ , atau  $99,16\%$ .
10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM dengan target  $76\%$ , telah tercapai sebesar  $80,24\%$ , atau  $105,57\%$ .
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM dengan target nilai  $93,76$ , baru tercapai dengan nilai  $93,62$ , atau  $99,85\%$ .
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM dengan target nilai 82, telah tercapai nilai  $99,43$ , atau  $120\%$ .
13. Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM dengan target  $80\%$ , telah tercapai sebesar  $90\%$ , atau  $112,5\%$
14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM dengan target  $80\%$ , telah tercapai sebesar  $84,29\%$ , atau  $105,35\%$ .

15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM dengan target 100%, telah tercapai sesuai target sebesar 100%, atau 100%.
16. Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM dengan target sebesar Rp. 34,89 M, telah tercapai sebesar Rp. 50,30 M, atau 120%.
17. Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM dengan target sebesar Rp. 0,653 M, telah tercapai sebesar Rp. 1,331 M, atau 120%.
18. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM dengan target sebanyak 12.500 orang, telah tercapai sebanyak 13.310 orang, atau 106,48%.
19. Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM dengan target sebanyak 29 Orang, telah tercapai sebanyak 34 orang, atau 117,24%.
20. Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati dengan target 47 kesepakatan, telah tercapai 63 kesepakatan, atau 120%.
21. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati dengan target 73%, telah tercapai 78,87%, atau 108,04%.
22. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM dengan target 100%, telah tercapai 100%, atau 100%.
23. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani dengan target 100%, telah terealisasi 100%, atau 100%.
24. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM dengan target nilai 91, telah terealisasi dengan nilai 100, atau 109,89%.
25. Indeks Perencanaan Program dengan target indeks 80, telah tercapai dengan indeks 91,43, atau 114,28%.
26. Indeks Perencanaan Anggaran dengan target indeks 80, telah tercapai dengan indeks 96,79, atau 120%.
27. Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor dengan target nilai 80, telah tercapai dengan indeks 93,48, atau 116%.



28. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM dengan target indeks 3,5 telah tercapai dengan indeks 4,01, atau 117,14%.
29. Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU dengan 1 Satker, telah tercapai 1 Satker, atau 100%.
30. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM dengan target nilai 90, telah terealisasi dengan nilai 99,39, atau 110,43%.
31. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM dengan target 100%, telah terealisasi 100%, atau 100%.
32. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu dengan target 100%, telah terealisasi 100%, atau 100%.
33. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu dengan target 100%, telah terealisasi 100%, atau 100%

Berkenaan hasil capaian pada Tahun 2024, maka diperlukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dipertahankan dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi melalui pencapaian target-target kinerja, maka pemantauan dan pengukuran kinerja perlu dilakukan secara sistematis dan berkala dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
2. Bukti dukung capaian kinerja dipersiapkan dengan baik sebagai wujud akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.
3. Seluruh Indikator kinerja perlu dilakukan pengawalan dengan baik guna memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sekretariat BPPSDM sebagai entitas tersebut wajib membuat laporan keuangan dan kinerja yang didasari pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi *guidance* bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi guna pencapaian target tahunan.

## **1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kelembagaan Sekretariat Badan Riset dan SDM KP, menjadi Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat BPPSDMKP dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah

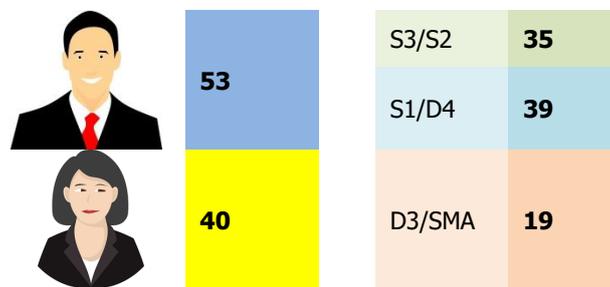
dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDMKP. Sekretariat BPPSDMKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menjalankan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

#### 1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sekretariat BPPSDMKP didukung oleh 136 personil yang terdiri atas 93 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 91 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 43 Tenaga non ASN, terdiri dari 31 PPNPN dan 12 PJLP. Dari 93 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 53 laki-laki dan 40 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 35 orang berpendidikan S2/S3, sebanyak 39 orang berpendidikan S1/D4, serta sebanyak 19 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per September 2024). Saat ini terdapat 2 pegawai sedang tugas belajar S2 dan 1 orang pegawai sedang tugas belajar S3. Dari 93 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDMKP, 5 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.



Gambar 2. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

Sumber : Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDM

#### 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BPPSDM KP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BPPSDMKP.

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang rencana strategis Sekretariat BPPSDMKP 2020-2024, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2024 serta pengukuran kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. **Lampiran:**

Perjanjian Kinerja.



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebelum terjadi perubahan nomenklatur, Rencana Strategis (Renstra), mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) tahun 2021-2024 Nomor 180/PER-BRSDM/2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020. Akibat perubahan kelembagaan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, terjadi peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur dari BRSDMKP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Menindaklanjuti perkembangan arah kebijakan/program/kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada Sasaran/Indikator/volume target dilakukan reviu terhadap Sasaran/Indikator/volume target pada Renstra BRSDMKP tahun 2020 – 2024 berdasarkan analisis capaian, analisis tindak lanjut dan action plan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

Penyesuaian Sasaran/Indikator/volume/target tersebut dituangkan dalam Bab II Reviu Renstra BPPSDM KP Uraian Hasil Reviu dengan dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2024.

Tabel 1. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMKP 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024			KET
		RENSTRA	RENJA	PK	
1 SDM KP Peserta Diklat yang Tersetap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1 Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Tersetap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	75	72	72	(a)
	2 Nilai PNBK BPPSDM (Rupiah Miliar)	-	-	35,544	

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET 2024			KET
				RENSTRA	RENJA	PK	
2	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	3	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	255	392	402	(a)
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)	2.000	3.000	4.000	(a)
		5	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)	1.500	1.800	2.000	(a)
		6	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM (orang)	-	-	12.500	
4	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat	7	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)	11	15	15	(b)
5	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan	8	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	-	44	53	
6	Hasil Perumusan Kebijakan dan Inkubator Bisnis Kelautan dan Perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat	9	Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Kebijakan)	30	-	-	
			Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (kebijakan)	-	8	8	(c)
7	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BRSDM	10	Nilai PM PRB Lingkup BPPSDM (nilai)	36	33,5	-	
		11	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup BPPSDM (unit)	13	16	17	(a)
		12	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BPPSDM TA 2022 (%)	<1	≤0,5	<0,5	(a)
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPSDM (indeks)	76	79	79	(a)
		14	Nilai PM SAKIP BPPSDM (nilai)	86,75	77	81	(a)
		15	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3	3,3	3,3	(a)
		16	Persentase Unit kerja Lingkup BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	90	94	94	(a)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024			KET	
		RENSTRA	RENJA	PK		
	17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPSDM (%)	80	80	82	(a)
	18	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDM (Nilai)	1 (unit kerja)	76	76	
	19	Nilai IKPA Lingkup BPPSDM (nilai)	90	93,76	93,76	(a)
	20	Nilai NKA Lingkup BPPSDM (nilai)	89	86	86	(a)
	21	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDM (%)	72,5	80	80	(a)
	22	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDM (%)	72,5	80	80	(a)
	23	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)	5.000	5.423	5.423	(a)

Sumber : Reviu Renstra BPPSDM Tahun 2024

Penjelasan Kolom Keterangan pada Tabel 1:

Target tahun 2024 pada Renstra perlu dilakukan penyesuaian dengan justifikasi antara lain:

- (a). Prognosa capaian 2023;
- (b). Penyesuaian kebijakan BPPSDM berupa dukungan terhadap program prioritas KKP; dan
- (c). Penyesuaian terkait beralihnya tuisi kebijakan pada BPPSDM.

## 2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka BPPSDM Tahun 2024 terdapat 3 program yaitu, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terdapat 5 sasaran program dan 8 indikator kinerja program, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdapat 1 sasaran program dan 1 indikator kinerja program, serta pada

program dukungan manajemen terdapat 1 sasaran program dan 14 indikator kinerja program.

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi didukung oleh kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2375, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan kode 2376.

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6703, kegiatan Inkubasi Bisnis Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6704, kegiatan Pengujian Kelayakan Teknologi Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 6705, dan kegiatan Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan 6706.

Sejak tahun 2020, Program Dukungan Manajemen didukung oleh 2 kegiatan yaitu kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan kode kegiatan 2378, dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP dengan kode kegiatan 4345. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP ditempatkan pada program dukungan manajemen sesuai surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang menyebutkan bahwa sepanjang program Pendidikan dan pelatihan diperuntukkan bagi SDM aparatur internal K/L.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 pada kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BPPSDM, menetapkan 3 Sasaran Kegiatan yaitu :(1). Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM; (2). Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM; dan (3). Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM. Rincian anggaran pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Mulai periode Triwulan II – III terdapat perubahan pada profil Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM, yang disebabkan perubahan Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDM sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina

Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP sebagai Unit Organisasi Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut : (1). Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Jakarta; (2). Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok; (3). Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur; Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi; Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus; Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul; Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Benoa; Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Gorontalo; Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LRPTK) Wakatobi.

### **2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang menjadi tekad serta janji pimpinan unit kerja kepada pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga untuk menerima amanah/tanggung jawab/kinerja yang diberikan serta menjalankan target yang ditetapkan.

Sekretariat BPPSDMKP memiliki 3 sasaran kegiatan pada Tahun 2024 yaitu: (1) Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM; (2) Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM; dan (3) Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2023, dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) IKU. Pada perjalannya mengalami 3 (tiga) kali revisi yaitu pada:

#### **1. Tanggal 2 April 2024.**

Dengan perubahan sebagai berikut: (1). perubahan pejabat penandatanganan semula "Sekretariat BRSDM" menjadi "Plt. Sekretaris

BPPSDM"; (2). perubahan nomenklatur semula "Sekretariat BRSDM" menjadi "Sekretariat BPPSDM" dan (3). perubahan nomenklatur IKU semula "Nilai PNBP BPPSDM" menjadi "Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM".

## 2. Tanggal 14 Oktober 2024.

Revisi ini dalam rangka menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan, meliputi Rencana Kerja (Renja), RKA-K/L DIPA dan PK yang mempunyai pengaruh dalam penilaian SAKIP dengan menindaklanjuti:

- Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 2526/SJ.1/RC.610/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Revisi Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024 dan Persiapan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- Persetujuan revisi anggaran BPPSDMKP dari Ditjen Anggaran terkait tindak lanjut SOTK, dukungan Kalamo, dan peningkatan sarana prasarana sebagaimana Surat Persetujuan Revisi Anggaran (SPRA) nomor S-533/AG/AG.3/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024.

Beberapa perubahan dalam rancangan tersebut antara lain:

- Penambahan IKU: (1) Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Rupiah Miliar) dan (2) Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (orang).
- Perubahan narasi dan target IKU semula "Nilai Kinerja Anggaran (NKA)" dengan target 81, menjadi "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)" dengan target 71.

## 3. Tanggal 24 Desember 2024.

Revisi PK Level II Lingkup BPPSDM termasuk Sekretariat BPPSDM. Revisi ini terkait dengan penambahan belanja pegawai, rekomposisi blokir AA antar Eselon I KKP serta pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN). Sekaligus merupakan tanggapan atas usulan Drop Pagu Anggaran KKP Tahun 2024, dimana usulan KKP untuk melakukan drop pagu dan volume yang mengalami blokir anggaran Automatic Adjustment (AA) belum dapat diproses lebih lanjut melalui

mekanisme revisi anggaran. Beberapa usulan perubahan dalam rancangan tersebut antara lain : (1) Perubahan total target PNPB BPPSDM semula 32,134 Milyar menjadi 35,544 Milyar dan (2) Perubahan target Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker) semula 8 menjadi 6.

Berikut disajikan sandingan perbandingan PK awal dengan Revisi Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Sandingan PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target			
		Awal	Revisi I April	Revisi II Oktober	Revisi III Desember
1 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1 Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17	17	17	17
	2 Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8	8	8	6
	3 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
	4 Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85	85	85	85
	5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81	81	81	81
	6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94	94	94	94
	7 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3	3,3	3,3	3,3
	8 Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	94	94
	9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82	82	82	82
	10 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76	76	76	76
	11 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	93,76	93,76	93,76	93,76
	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	82	82	71	71

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target				
		Awal	Revisi I April	Revisi II Oktober	Revisi III Desember	
	13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80	80	80	80
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80	80	80	80
	15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100	100	100	100
	16	Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134	32,134	32,134	34,891
	17	Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Rupiah Miliar)	-	-	0,653	0,653
	18	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (orang)	-	-	29	29
	20	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47	47	47	47
	21	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73	73	73	73
	22	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100	100	100	100
	23	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100	100	100	100
	24	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91	91	91	91
	25	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80	80	80	80
	26	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80	80	80	80
	27	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80	80	80	80
	28	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5	3,5	3,5	3,5
	29	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1	1	1	1
	30	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90	90	90	90

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target					
		Awal	Revisi I April	Revisi II Oktober	Revisi III Desember		
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	31	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	32	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	100	100	100
		33	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100	100	100	100

Sumber Data: PK Sekretariat BPPSDM

Untuk menunjang Capaian kinerja dimaksud dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai, berikut disampaikan dukungan anggaran Sekretariat BPPSDMKP beserta UPT di bawahnya berdasarkan PK Sekretariat BPPSDMKP revisi III sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	61.303.268.000
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM)	59.730.211.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024		121.033.479.000

Sumber Data: PK Sekretariat BPPSDM tanggal 24 Desember 2024

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024, menggunakan PK Sekretariat BPPSDMKP revisi III per tanggal 24 Desember 2024, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 (revisi III)

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM	6

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM	0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM	100
		16	Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM	34,89
		17	Nilai PNBPN Satker Binaan Sekretariat BPPSDM	0,65
		18	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM	12.500
		19	Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM	29
		20	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati	47
		21	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	73
		22	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM	100
		23	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani	100
		24	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM	91
		25	Indeks Perencanaan Program	80
		26	Indeks Perencanaan Anggaran	80
		27	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor	80
		28	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM	3,5
		29	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU	1
		30	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
2.	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	31	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM	100
3.	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	32	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu	100
		33	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu	100

Sumber : PK Sekretariat BPPSDM tanggal 24 Desember 2024

## 2.4. PENGUKURAN KINERJA

### 2.4.1. Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU. Metode tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	Nilai 110 - 120	Istimewa
	Nilai 90 - <110	Baik
	Nilai 70 - <90	Cukup
	Nilai 50 - <70	Kurang
	Nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

### 2.4.2. Tata Cara Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMKP dilakukan setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan

oleh Tim Kerja Monev dan Pelaporan, secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga level Pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan oleh masing-masing satuan kerja.



## Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 sebesar 103,53, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 102,77, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 3. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

Sumber : Aplikasi Kinerjaaku Tahun 2024

Sekretariat BPPSDMKP pada Tahun 2024 mengemban program dukungan manajemen yang didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP yang terdiri atas 33 (tiga puluh tiga) IKU. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, sebanyak 17 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110), dan 16 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120). Faktor tersebut yang menjadi pengungkit sehingga capaian NKO Sekretariat BPPSDMKP di kategorikan baik berdasarkan indeks pada Aplikasi Kinerjaaku (gambar 3).

### 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing Sasaran Kegiatan.

Sekretariat BPPSDMKP sesuai PK per 24 Desember 2024, menjalankan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 33 IKU, dengan capaian secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	%
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM	Unit	17	19	111,76
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM	Unit/ Satker	6	8	120
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM	%	0,5	0,14	120
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM	indeks	85	88,4	104
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM	Nilai	81	88,79	109,62
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM	Nilai	94	96,1	102,23
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM	Nilai	3,3	3,75	113,64
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	%	94	115,28	120
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM	%	82	81,31	99,16
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM	%	76	80,24	105,58

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	%
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM	Nilai	93,76	93,62	99,85
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM	Nilai	82	99,43	120
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM	%	80	90	112,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM	%	80	84,29	105,36
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM	%	100	100	100
		16	Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM	Rupiah Miliar	34,89	50,3	120
		17	Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM	Rupiah Milyar	0,65	1,33	120
		18	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM	orang	12.500	13.310	106,48
		19	Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM	orang	29	34	117,24
		20	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati	Kesepakatan	47	63	120
		21	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	73	78,87	108,04
		22	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM	%	100	100	100
		23	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani	%	100	100	100
		24	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM	Nilai	91	100	109,89
		25	Indeks Perencanaan Program	indeks	80	91,43	114,29
		26	Indeks Perencanaan Anggaran	indeks	80	96,79	120
		27	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor	Nilai	80	93,48	116,85
		28	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM	Nilai Kualitas	3,5	4,01	114,57
		29	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU	Satker	1	1	100
		30	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	Nilai	90	99,39	110,43

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Capaian 2024	%
2.	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	31	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM	%	100	100	100
3.	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	32	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu	%	100	100	100
		33	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu	%	100	100	100

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

## **SASARAN KEGIATAN -1**

### **TERPENUHINYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN BPPSDM**

Sasaran kegiatan "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM" didukung oleh 30 (tiga puluh) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

#### **INDIKATOR KINERJA 1**

##### **Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

##### **Lingkungan BPPSDM (unit)**

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BPPSDMKP yang berpredikat menuju WBK. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, pembangunan zona integritas dianggap sebagai role mode pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan sehingga setiap unit kerja Eselon I lingkup KKP sebagai unit pembangun integritas berperan untuk mendorong terwujudnya WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerjanya.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, BPPSDMKP menetapkan satuan kerja untuk menjadi proyek percontohan. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker di lingkungan BPPSDMKP dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pengukuran IKU ini dilakukan triwulanan, adapun capaian atas indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit) adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)

<b>IKU 1-Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)</b>									
<b>Realisasi</b>				<b>2024</b>				<b>Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM</b>	
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>% Kenaikan 2023-2024</b>	<b>Target 2024</b>	<b>% Capaian thd target 2024</b>
8	10	13	16	17	19	111,76	18,75	13	120

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP (unit) pada tahun 2024 sebanyak 19 unit, dari target sebanyak 17 unit (111,76%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat kenaikan

18,75%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra, telah mencapai 120%.

Capaian sebanyak 19 satker, merupakan akumulasi dari jumlah satker di lingkungan BPPSDMKP yang mendapat predikat WBK mulai tahun 2017 sampai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
1	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	2017
2	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros	2017
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	2017
4	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	2017
5	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru	2018
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	2018
7	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BPRPUPP) Palembang	2019
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	2021
9	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	2021
10	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	2022
11	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	2022
12.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	2022
13.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	2023
14.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	2023
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	2023
16.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung	2024
17.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	2024

No	Satuan Kerja	Tahun Perolehan
18.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	2024
19.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	2024

Sumber: Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDMKP

Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup BPPSDMKP selama periode tahun 2017 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Satuan Kerja Lingkup BPPSDMKP Berpredikat WBK per Tahun

INDIKATOR KINERJA							
Jumlah Unit Kerja lingkup BPPSDM Berpredikat Menuju WBK (satker, kumulatif)							
Capaian							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	6	7	7	9	12	15	19

Sumber: Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDMKP

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah :

1. Komitmen pimpinan dan semua pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama;
2. Kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik;
3. Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan zona integritas menuju WBK antara lain :

1. Hasil penilaian TPI pada unit kerja/satuan kerja yang diajukan telah memenuhi ambang batas penilaian, yaitu total nilai pengungkit dan hasil

- minimal 75.00 dengan minimal nilai pengungkit 40 untuk Menuju WBK dan minimal 85.00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk Menuju WBBM;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBK dan bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit untuk predikat Menuju WBBM;
  3. Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 untuk Menuju WBK dan 18,88 untuk menuju WBBM dengan ketentuan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 13,5 untuk Menuju WBK dan 13,88 untuk menuju WBBM atau minimal skor survei 3,60 untuk Menuju WBK dan skor survei 3,70 untuk menuju WBBM, serta nilai sub komponen "Persentasi TLHP" minimal 5,0 untuk Menuju WBK dan Menuju WBBM;
  4. Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan publik kepada Masyarakat" minimal 15,00 atau skor survei minimal 3,00 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBK dan minimal 17,00 atau skor survei minimal 3,40 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBBM;
  5. Kriteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM adalah LHKASN dan LHKPN 100% (sesuai dengan Bab II Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah);

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini diantaranya adalah kegiatan-kegiatan pendampingan kepada UPT terkait dengan melibatkan Pusat dan Inspektorat Jenderal KKP. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2017, bahwa unit kerja yang telah berpredikat WBK lebih dari 2 (dua) tahun dilakukan penilaian ulang untuk mempertahankan predikat WBK.

## INDIKATOR KINERJA 2

### Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah unit kerja lingkup BPPSDMKP yang dilakukan pembangunan zona integritas untuk selanjutnya dinilai menjadi unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Eselon I untuk melakukan pendampingan dan pembangunan zona integritas kepada unit kerja terpilih sebelum dilakukan penilaian menjadi unit kerja yang berpredikat menuju WBK. IKU Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker) diukur Tahunan, dengan polarisasi *maximize*.

BPPSDMKP melalui Nota Dinas Nomor 285/BPPSDM.1/KP.750/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 Hal Pengajuan Unit Kerja yang akan dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPPSDMKP Tahun 2024 sebanyak 8 unit kerja yaitu: (1). Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung; (2). Politeknik KP Bitung; (3). Politeknik KP Karawang; (4). Politeknik KP Jember; (5). Politeknik KP Dumai; (6). Politeknik KP Sorong; (7). Politeknik KP Kupang; dan (8). Politeknik KP Bone.

Adapun penetapan unit kerja yang dibangun menuju WBK tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Yang Dibangun Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BPPSDM KP Tahun 2024.

Tabel 10. Unit Kerja yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM

IKU 2-Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0	0	6	7	6	8	120	14,29		

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Unit Kerja yang Dibangun Untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDMKP pada tahun 2024 sebanyak 8 unit, dari target sebanyak 6 unit (120%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat kenaikan 14,29%, sedangkan pada reviu Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target pada tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja unit yang dibangun menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) lingkup BPPSDM, diperlukan komitmen dan peran serta seluruh entitas lingkup BPPSDMKP untuk mencapai tujuan pencegahan korupsi, melalui beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Pelaporan Korupsi: Indikator ini mengukur jumlah laporan korupsi atau perilaku tidak etis yang diterima oleh unit anti-korupsi dalam periode waktu tertentu. Jika jumlah laporan meningkat, menandakan kesadaran akan korupsi meningkat dan masyarakat atau pegawai merasa lebih nyaman melaporkan kecurigaan.
2. Tingkat Penanganan Kasus: Indikator ini mengukur seberapa cepat dan seberapa baik unit anti-korupsi menangani kasus yang dilaporkan. Semakin cepat kasus ditangani, semakin tinggi efektivitas unit tersebut.
3. Pengukuran Kepuasan Stakeholder: Melakukan survei atau pemantauan secara reguler terhadap stakeholder, termasuk pegawai, manajemen, dan masyarakat umum, untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja unit anti-korupsi.
4. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kode Etik dan Kebijakan: Mengukur sejauh mana karyawan dan anggota organisasi mematuhi kode etik, kebijakan anti-korupsi, dan prosedur yang ditetapkan oleh unit WBK.
5. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Menilai efektivitas program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh unit anti-korupsi, dan seberapa banyak kesadaran terhadap korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi meningkat di kalangan karyawan dan masyarakat umum.

6. Penurunan Kasus Korupsi: Indikator ini mengukur apakah ada penurunan kasus korupsi yang dilaporkan atau terdeteksi setelah unit anti-korupsi didirikan atau diperkuat. Hal ini menunjukkan upaya pencegahan berhasil mengurangi kejadian korupsi.
7. Penghargaan dan Pengakuan: Penerimaan penghargaan atau pengakuan dari lembaga atau organisasi independen atas kinerja unit anti-korupsi dalam mendorong Wilayah Bebas dari Korupsi.

Penggunaan dan pengukuran indikator-indikator ini dapat membantu mengevaluasi kesuksesan unit kerja dalam mencapai tujuan WBK. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi kinerja secara berkala serta melakukan perbaikan berkelanjutan agar unit anti-korupsi tetap efektif dan relevan dalam upaya pencegahan korupsi.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target dimaksud diantaranya dengan melakukan pendampingan ke UPT yang diusulkan untuk dibangun menuju WBK, yaitu BPPP Bitung, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Sorong dan Politeknik KP Bone.

### **INDIKATOR KINERJA 3**

#### **Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BPPSDM merupakan audit oleh auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%) diukur Tahunan dengan polarisasi *minimize*.

Tabel 11. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM

IKU 3-Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
0,025	0,02	0,01	0,003	0,5	0,14	120	- 13,34	1	113,60

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IKU Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM pada tahun 2024 sejumlah 0,14%, dari target senilai  $\leq 0,5\%$  (120%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat penurunan 13,34%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra, telah mencapai 113,60%.

Penurun Capaian dari 2023 ke 2024 terjadi karena terdapat perbedaan penilaian pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 apabila hasil temuan telah ditindaklanjuti, maka tidak lagi tercantum pada nota dinas penyampaian hasil temuan, sedangkan pada tahun 2024 meskipun seluruh temuan sudah ditindaklanjuti, nilai temuan keseluruhan masih tercantum pada nota dinas hasil temuan, sehingga terakumulasi dan membuat nilai temuan lebih besar daripada tahun 2023, seluruh temuan LHP BPK telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Tuntas berdasarkan Aplikasi pemantau Temuan LHP BPK.

Sementara apabila Capaian indikator ini dibandingkan dengan Kementerian lain pada tahun 2023, sebagaimana berikut:

Tabel 12. Perbandingan Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Tahun 2023

Unit Kerja			
Sekretariat BPPSDM KP		Badan Pengembangan SDM , Kementerian Komunikasi dan Informatika	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
0,5	0	1	0,68

Sumber: Laporan Kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah terselenggaranya tertib administrasi di seluruh Satker lingkup BPPSDM dan adanya koordinasi yang baik dengan Sekretariat Jenderal KKP, Inspektorat Jenderal dan Mitra K/L lain sehingga dapat dilakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit internal maupun eksternal.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dimaksud antara lain: Melakukan pembinaan tertib administrasi keuangan seluruh Satker lingkup BPPSDM; Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan; Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP, Inspektorat Jenderal dan Mitra K/L lain; Melakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi temuan yang dilakukan audit internal maupun eksternal.

#### **INDIKATOR KINERJA 4**

##### **Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks)**

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5. Pengukuran IKU ini dilakukan semesteran. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks) sebagai berikut:

Tabel 13. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks)

<b>IKU 4-Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)</b>									
<b>Realisasi</b>				<b>2024</b>				<b>Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM</b>	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
77,88	79,73	82,07	87,93	85	88,40	104,00	0,53	76	116,32

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat BPPSDM (indeks) sampai dengan tahun 2024 sebesar 88,40 dari target 85 (104%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat kenaikan 0.53%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra, telah mencapai 116,32%. Sementara perbandingan Capaian indikator kinerja ini pada 2023 dengan Kementerian lain adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (indeks) Tahun 2023

Unit Kerja					
Sekretariat BPPSDM KP		BPPSDM Kementerian ESDM		Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
81	87,93	82,13	88,48	81	78,48

Sumber: Laporan Kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat BPPSDM, antara lain komitmen untuk meningkatkan pengembangan kompetensi, serta adanya dokumen perencanaan pengembangan SDM Aparatur yang telah disusun secara berkala dengan di dukung pelayanan kelembagaan yang baik.

Kegiatan pendukung capaian IKU antara lain: Melakukan sosialisasi secara daring dan menerbitkan sertifikat; Sosialisasi terkait IP ASN dan MyASN yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan Youtube BPPSDMKP bagi seluruh pegawai lingkup BPPSDMKP; dan Diseminasi Profesi Dosen di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **INDIKATOR KINERJA 5**

### **Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk

lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Pengukuran IKU Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM dilakukan Tahunan, dengan polarisasi *Maximize*.

Tabel 15. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)

IKU 5-Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
87,93	86,65	81,22	84,33	81,0	88,79	109,62	5,29	86,75	102,35

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM sampai dengan tahun 2024 memperoleh nilai 88,79 dari target 81 (109,62%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat kenaikan 5,29%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra telah mencapai 102,35%. Sementara perbandingan IK Penilaian Mandiri SAKIP pada tahun 2023 dengan Kementerian lain sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai) Tahun 2023

Unit Kerja											
Sekretariat BPPSDMKP		BPPSDM, Kominfo		BPPSDM, Kementerian PDT		BPPSDM, Kementerian Kehutanan		BPPSDM, Kementerian ESDM		Sekretariat Utama BKN	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
80,5	84,33	72,5	72,85	80	68,45	78	76,21	89	87,45	80	68,35

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja nilai SAKIP BPPSDM antara lain adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di lingkungan BPPSDMKP, dalam mengawal implementasi SAKIP serta menyiapkan kelengkapan data dukung serta peningkatan

ketertiban unit kerja dalam mendokumentasikan proses implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya implementasi SAKIP di lingkungan BPPSDMKP antara lain:

1. *Kick Off Meeting* Implementasi SAKIP dan Rekonsiliasi Dokumen SAKIP Pra Penilaian Mandiri Tahun 2024 Lingkup BPPSDMKP, pada tanggal 14 – 16 Mei 2024, yang diikuti oleh pejabat eselon I, eselon II, para Kepala UPT dan pengelola kinerja di lingkungan BPPSDMKP.
2. Kegiatan pengelolaan kinerja lingkup BPPSDMKP pada area perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagaimana Permen KP no. 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Pendampingan Penilaian Mandiri SAKIP level 3 UPT lingkup BPPSDMKP selama periode Mei – Juni 2024 dilaksanakan di 5 (lima) Zona, yaitu Zona I bertempat di STP Kampus Serang, Zona II bertempat di BPPP Tegal, Zona III bertempat di BRPSDI Jatiluhur, Zona IV bertempat di BPPP Medan dan Zona V bertempat di SUPM Pariaman.
4. Penilaian Mandiri (PM) dan verifikasi bukti dukung SAKIP level II lingkup BPPSDMKP, pada tanggal 20-22 Mei 2024 bertempat di Politeknik AUP Kampus Cikaret Bogor. Proses tersebut menggunakan aplikasi DSMS BPPSDMKP dengan *up load* dokumen yang kemudian dilakukan verifikasi dan pembinaan oleh tim evaluator.
5. Penilaian Mandiri (PM) dan verifikasi bukti dukung SAKIP level I BPPSDMKP yang dilakukan oleh Tim Inspektorat III, pada tanggal 10 – 13 Juli 2024.
6. Hasil penilaian IKU PM SAKIP BPPSDM sesuai surat Inspektur Jenderal KKP yang ditujukan kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, nomor surat B.242/ITJ/HP.440/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa nilai hasil evaluasi AKIP BPPSDMKP tahun 2024 sebesar 88,79.

## INDIKATOR KINERJA 6

### Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat BRSDM merupakan *quick assessment* terhadap SAKIP instansi. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja BPPSDMKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap satker di lingkungan BPPSDMKP untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Penilaian mencakup aspek kepatuhan (25%), aspek kesesuaian (25%), aspek ketercapaian (30%) dan ketepatan (20%). IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja di *cascading* ke seluruh satker di lingkungan BPPSDMKP. Pengukuran IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai) adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (nilai)

IKU 6-Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (nilai)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		95,83	95,94	94,0	96,10	102,23	0,17	94,00	102,23

Sumber: Aplikasi kinerjaku

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM sampai dengan tahun 2024 memperoleh nilai 96,10 dari target 94 (102,23%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat kenaikan 0,17%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra telah mencapai 102,35%.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen seluruh penanggung jawab IKU dalam mengawal proses pencapaian IKU berikut ketersediaan bukti dukung. Dukungan dan perhatian pimpinan menjadi

kunci keberhasilan pencapaian disamping rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dalam rangka memantau dan memverifikasi hasil capaian dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU. Selain itu juga mengawal aspek penilaian pada area kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan penyajian bukti dukung Capaian kinerja tahun 2024.

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain: (1) rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi terkait rekonsiliasi kinerja, validasi dan verifikasi capaian kinerja secara berkala dan penyampaian laporan berkala capaian kinerja, (2) reviu dan pengawalan dokumen rekonsiliasi kinerja Sekretariat BPPSDM tahun 2024.

## **INDIKATOR KINERJA 7**

### **Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)**

Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor B.603/SJ.2/TU.210/II/2024 tentang Penyampaian Indikator Kinerja Utama Maturitas Penyelenggaraan SPIP KKP dan Unit Eselon I, kemudian setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat I disarankan agar nilai target ditingkatkan hal ini didasarkan atas pertimbangan capaian nilai tahun sebelumnya sehingga disimpulkan bahwa Unit Eselon I dapat menentukan target Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I pada Tahun 2024 dengan rentang nilai sebesar 3,3 sampai dengan 3,7. IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai) dilakukan pengukuran Tahunan.

Tabel 18. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM

IKU 7- Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
3,95	3	3	3,80	3,3	3,75	113,64	-1,32	3,00	120

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM sampai dengan tahun 2024 memperoleh nilai 3,75 dari target 3,3 (113,64%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat penurunan 1,32%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra telah mencapai 120%. Apabila dibandingkan dengan Kementerian lain pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023

Unit Kerja					
Sekretariat BPPSDM KP		BPPSDM Kementerian ESDM		Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,1	3,8	4,3	3,44	4	3,3

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Keberhasilan SPIP di BPPSDM dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain:

1. Rapat Pengisian Kertas Kerja Penetapan Tujuan dan Pencapaian Tujuan SPIP KKP pada tanggal 19 Juni 2024 di Ruang Rapat Profesional GMB III Lantai 4, berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan No. B. 1794/SJ.1/TU.330/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.
2. Rapat Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Komponen Struktur dan Proses pada tanggal 21 Juni 2024 di Ruang Rapat BerAkhlak GMB III Lantai 3, berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan No. B.1808/SJ.2/TU.330/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.
3. Asistensi Input Data pada Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal 26 s.d 28. Juni 2024, berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan No. B.1795/SJ.1/TU.330/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
4. Rapat Peginputan Data Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2024, berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan No. 3020/SJ.2/TU.330/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
5. Rekonsiliasi Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan KKP pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2024, berdasarkan surat Inspektur I, Itjen KKP No. B. 137/ITJ.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.

## **INDIKATOR KINERJA 8**

### **Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)**

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi sehingga pengetahuan yang dihasilkan akan bermanfaat ketika disampaikan kepada pihak- pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Pada Tahun 2024 IKU manajemen pengetahuan yang terstandar KKP, dimana aplikasi pendukung manajemen pengetahuan menggunakan Collaboration Office dengan link <https://portal.kkp.go.id>. Pusdatin selaku Penanggung Jawab level I di KKP menyesuaikan penggunaan dan cara pelaksanaan manajemen pengetahuan yang terstandar KKP.

Sehubungan dengan belum lengkapnya hasil validasi Surat Tugas Mekanisme Kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam rangka pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terintegrasi pada Portal *Collaboration Office* di laman <https://portal.kkp.go.id> untuk Tahun 2024 lingkup KKP, maka pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah pejabat setingkat eselon 2 dan Para Ketua Tim Kerja lingkup Sekretariat BPPSDMKP. Adapun pada penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan adalah sebagaimana pada berikut:

- a. Komponen penilaian : Keaktifan (100%)
  1. Konten dokumentasi tulisan kegiatan rapat/ seminar/ workshop/ diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5;
  2. Konten berupa karya infografis poin 1;
  3. Konten berupa jurnal/video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3;
- b. Aplikasi Collaboration Office dengan alamat [portal.kkp.go.id](https://portal.kkp.go.id);
- c. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4 Poin
- d. Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Pengukuran IKU Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dilakukan Triwulanan. Capaian IKU ini di Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 20. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

IKU-8. Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
98,42	98,46	100	116,58	94	115,28	120	-1,12	90	120

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%) Tahun 2024 sebesar 115,28 % dari target 94 % atau 120 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 1,12 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 120 %.

Faktor faktor keberhasilan capaian dibandingkan dengan target disebabkan oleh:

- 1) Persentase nilai terbesar diperoleh dari keaktifan karena Pimpinan BPPSDMKP sudah berkontribusi dalam keaktifan pada aplikasi *collaboration office*.
- 2) Pimpinan Level 2 serta Para Ketua Tim kerja Lingkup Pusat BPPSDMKP yang telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W + 1H, infografis dan Video
- 3) Peningkatan kinerja pada setiap triwulan: tren peningkatan kinerja secara umum dapat dilihat dari perbandingan capaian tahun 2023 dan 2024.
- 4) Evaluasi dan perbaikan: Tim yang bertanggung jawab atas pencapaian ini telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pada tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
- 5) Peningkatan kualitas sistem manajemen pengetahuan: telah dilakukan penyesuaian pada sistem manajemen pengetahuan yang digunakan, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendukung kinerja.

6) Dukungan pimpinan: adanya dukungan pimpinan mulai dari Ketua Tim Kerja sampai dengan Sekretaris BPPSDMKP yang mendorong tercapainya target yang telah ditetapkan.

Kegiatan dalam pencapaian dukungan terhadap sosialisasi aplikasi *collaboration office* dan pemutakhiran manual IKU sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sehingga pemahaman terkait perubahan pola hitung dapat terinformasikan dengan baik.

## INDIKATOR KINERJA 9

### Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%) merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran IKU ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%) Tahun 2024 berikut:

Tabel 21. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)

IKU-9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
91,3	88,73	61,11	80,95	82	81,31	99,16	0,44	80	101,64

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah sebesar 81,31 % dari target 82 % atau 99,16 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 0,44 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 101,64 %. Apabila dibandingkan dengan Kementerian lain, pada tahun 2023 capaian indikator dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Tahun 2023

Unit Kerja					
Sekretariat BPPSDM KP		Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan		BPSDM, Kementerian PDT	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
80	80,95	92,5	98	72	62,65

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Capaian IKU ini belum mencapai target disebabkan masih terdapat 20 rekomendasi dari 3 LHE/LHA Inspektorat Jenderal KKP belum tuntas ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2024.

Kegiatan penunjang pencapaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%), antara lain : Koordinasi dengan satuan kerja yang masuk daftar temuan pada lingkup BPPSDMKP dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan tersebut; Melakukan kompilasi berkas/dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal; Melakukan penginputan/mengupload dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SIDAK; Melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen Tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK dan melakukan koordinasi dengan tim Auditor terkait BATL hasil penyampaian dokumen Tindak Lanjut.

## **INDIKATOR KINERJA 10**

### **Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif

orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria Inovasi adalah memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dan memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB. Pengukuran IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%) dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)

IKU-10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			81,52	76	80,24	105,58	-1,57		

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah senilai 80,24 % dari target 76% atau 105,58 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 1,57 %. sedangkan pada reviu Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup BPPSDM antara lain: Peraturan Menteri KP No. 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik di lingkungan KKP, yaitu: Pelaksanaan Uji Profesi, Pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat dasar), Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Pelatihan Tingkat Menengah), Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, Penggunaan peralatan dan mesin (pelayanan penggunaan peralatan dan permesinan), dan Publikasi Jurnal.

Selain itu, BPPSDMKP secara rutin melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publik antara lain:

1. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Pelayanan Publi bagi para petugas pemberi layanan setiap satker di lingkungan BPPSDMKP;
2. Pendampingan atau monitoring, yaitu identifikasi masalah dan upaya peningkatan mutu pelayanan yang terstandar kepada unit kerja yang memiliki pelayanan publik;
3. Koordinasi dan kegiatan pembinaan berkolaborasi dengan Pusdatin sebagai koordinator Pelayanan Publik di tingkat KKP dan tim tjen sebagai mitra kerja;
4. Membuat Forum Konsultasi Publik, FKP (Forum Konsultasi Publik) Pelayanan Publik untuk penyelenggara pelayanan dan masukan dari pengguna layanan.
5. Penilaian evaluasi penyelenggaraan pelayaan publik lingup BPPSDMKP (PEKPPP) untuk memantau pelaksanaan pelayaan publik, salah satunya adalah mengidentifikasi inovasi pelayanan publik di lingkungan BPPSDM.

Seluruh kegiatan ini melibatkan Pusdatin, Tim Itjen dan stakeholder terkait, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih efektif, efisiensi, mudah, dan ekonomis.

## **INDIKATOR KINERJA 11**

### **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Periode pengukuran IKU Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDMKP (nilai) adalah semesteran dengan polarisasi maximize.

Tabel 24. Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM

<b>IKU-11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)</b>									
<b>Realisasi</b>				<b>2024</b>				<b>Reviu Renstra Sekretariat BPPSDMKP</b>	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
92,41	89,9	87,94	92,37	93,76	93,62	99,85	1,35	90,00	104,02

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU pada Tahun 2024 ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan NOMOR 196/SJ.2/RC.610/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024 diketahui bahwa nilai IKPA Sekretariat BPPSDMKP sebesar 93.62 atau 99,85% dari target yang ditetapkan sebesar 93,76. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 1,35 %. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 104,02 %.

Sementara pada tahun 2023, apabila capaian ini dibandingkan dengan Kementerian lain sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2023

<b>Unit Kerja</b>							
<b>Sekretariat BPPSDM KP</b>		<b>BPPSDM, Kemen ESDM</b>		<b>Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan</b>		<b>Sekretariat Utama BKN</b>	
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
93,75	92,37	90,5	99,66	90	93,44	93	90,88

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Faktor faktor yang menjadi penghambat sehingga tidak memenuhi target karena terjadi rendahnya penilaian pada aspek deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP dan TUP. Hambatan tersebut dikarenakan kebutuhan dan dinamisasi organisasi yang cukup tinggi sehingga memerlukan dukungan anggaran yang berimplikasi atas deviasi halaman III DIPA serta penyelesaian tagihan kegiatan. Sinergitas antara perencanaan dengan realisasi pada halaman III DIPA harus dikawal dan diawasi sejak anggaran Tahun berjalan ditetapkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya deviasi baik plus ataupun minus sehingga nilai deviasi IKPA dapat dipertahankan dan ditingkatkan nilainya pada Tahun 2025. Demikian juga untuk Penyerapan anggaran, Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP dan TUP perlu perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana yang matang, sehingga realisasi anggaran lebih optimal. Namun demikian, capaian IKPA tahun 2024 masih naik sebesar 5,68% dibandingkan Tahun 2023 dan cenderung lebih baik dari sejak Tahun 2021. Jika nilai IKPA dapat ditingkatkan maka di Tahun 2025, capaian kinerja IKPA akan mendapatkan nilai istimewa (>110 %) yang berdampak pada peningkatan nilai NKO sekretariat BPPSDMKP.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pendukung capaian IKU, berupa penyusunan program dan anggaran, penyelesaian revisi anggaran, pemantauan halaman III DIPA, pemantauan pelaksanaan PBJ, serta rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran.

## **INDIKATOR KINERJA 12**

### **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)**

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap: Kinerja anggaran tingkat Satker; Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan

anggaran yang diukur, terdiri atas variabel efektivitas dan efisiensi. Pengukuran IKU Nilai Kinerja Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM

IKU-12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				82	99,43	121,26			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 99.43 atau 121,26% dari target yang ditetapkan sebesar 82. Indikator kinerja ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 serta tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor Keberhasilan Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM, antara lain :

- a. Melakukan pemantauan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI secara berkala dan tepat waktu.
- b. Melaksanakan anggaran TA 2024 dengan memperhatikan batas tertinggi pada indeks SBKU sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 melalui penyesuaian kembali besaran Volume RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU (Revisi DIPA/RKA-K/L) di Sekretariat BPPSDMKP.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU, antara lain: Rapat Assessment Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP; Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran di

Lingkungan KKP Triwulan I TA 2024 yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP; Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP; Bimbingan Teknis Capaian Output bagi Satker Lingkup KPPN Jakarta VI yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja serta Pemantauan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) s.d bulan Mei 2024 di Lingkungan KKP yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I Lingkup KKP.

### **INDIKATOR KINERJA 13**

#### **Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)**

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indikator ini merupakan indikator dengan target tahunan. Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM (%) diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN Hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST/Berita Acara Pemakaian) (bobot 25%);
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan pada Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 27. Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)

IKU-13.Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	77,5	90	90	80,0	90	112,50	0	72,5	120

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 90% atau 112,5% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak terjadi kenaikan atau tetap. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target sebesar 120 %.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan BMN yang akuntabel serta dukungan kepala satuan kerja lingkup BPPSDMKP yang secara aktif mengikuti arahan dan pendampingan terkait penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU sampai dengan akhir Tahun 2024 antara lain:

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Tahunan 2023;
- b. Melakukan Verifikasi dan Validasi Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara satker lingkup BPPSDMKP dan mengusulkan kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang sesuai kewenangannya;
- c. Melakukan Verifikasi validasi usulan Penghapusan Barang Milik Negara satker lingkup BPPSDMKP dan mengusulkan kepada Pengelola Barang serta menerbitkan persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan kewenangannya;

- d. Melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara ke satker BRPSDI, BRPI, BDA Sukamandi, BRBIH;
- e. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara Sekretariat BPPSDMKP dalam rangka serah terima Barang Milik Negara kepada satker SUPM Kota Agung, BRBIH, BRPBATPP, Politeknik AUP;
- f. Mendampingi Inspektorat V melakukan Identifikasi, inventarisasi dan asersi aset Properti Investasi lingkup BPPSDMKP pada satker BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BBRBLPP Gondol, Politeknik Kupang, BRPBAPPP Maros, BPPP Ambon;
- g. Mendampingi Inspektorat V melakukan Identifikasi, inventarisasi aset Rusak Berat Departemen Pertanian yang masih tercatat di neraca BPPSDMKP pada satker BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BBRBLPP Gondol, Politeknik Kupang, BRPBAPPP Maros, BPPP Ambon;
- h. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024 Lingkup BPPSDMKP di Jakarta tanggal 9 s.d 12 Juli 2024;
- i. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 di Bandung tanggal 3 s.d 5 September 2024;
- j. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Lingkup BPPSDMKP di Jakarta tanggal 8 s.d 11 Oktober 2024.
- k. Kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP TA 2024 oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal III tanggal 21 November 2024 s.d 4 Desember 2024 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.1022/ITJ.3/KP.440/XI/2024;
- l. Finalisasi Penilaian Efektivitas Pengelolaan BMN lingkup BPPSDMKP TA 2024 oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal III di Bogor tanggal 2 s.d 4 Desember 2024;

- m. Pembinaan Pengelolaan BMN dan Rumah Negara di Politeknik AUP Kampus Bogor dan di pada tanggal 19-21 Desember 2024;
- n. Pembinaan Pengelolaan BMN dan Tindak lanjut usulan penghapusan aset Eks Deptan di Satker BRPBATPP Bogor di pada tanggal 19-21 Desember 2024.

## INDIKATOR KINERJA 14

### Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang /Jasa BPPSDM (%)

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%), merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDMKP yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat 6 komponen penilaian yang terdiri atas: (1). Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%); (2). Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%); (3). Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%); (4). Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%); (5). Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%); (6). Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024 (15%). Periode pengukuran pada IKU ini yaitu tahunan dengan polarisasi maximize.

Tabel 28. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)

IKU-14.Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	75,40	88,66	88	80,0	84,29	105,36	-4,22	72,5	116,26

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 84,29% atau 105,36% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,22%. Dibandingkan dengan target Renstra, presentase

capaian telah melampaui target sebesar 116,26 %. Sementara jika dibandingkan dengan Kementerian lain pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 29. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023

Unit Kerja			
Sekretariat BPPSDM KP		Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
77,5	88	80,6	83,24

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian antara lain adanya koordinasi yang baik melalui rapat-rapat dengan Kepala Satker, PPK, dan Pokja PBJ dalam percepatan pelaksanaan PBJ lingkup BPPSDMKP yang dilaksanakan setiap awal bulan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU ini sampai dengan akhir Tahun 2024 antara lain:

- a. Pengisian Kertas Kerja Reviu dalam rangka Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ Triwulan I Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP;
- b. menghadiri undangan Biro Umum dan PBJ untuk melakukan validasi pengisian data Non tender, e-Kontrak dan e-Purchasing dalam rangka penilaian Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP) KKP Tahun 2023 lingkup KKP pada tanggal 26 Januari 2024;
- c. menghadiri undangan Biro Umum dan PBJ dalam rangka pembahasan usulan penggunaan produk impor pada satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dan Ditjen PKRL pada tanggal 14 Maret 2024;
- d. Menghadiri undangan Biro umum dan PBJ dalam rangka pembahasan Usulan Produk Impor pada satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 15 Juli 2024;
- e. Rapat dalam rangka pembahasan pengadaan bahan makan taruna/siswa TA. 2024 pada Satuan Pendidikan KP tanggal 2 juli 2024;

- f. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Perkembangan PBJ di Politeknik KP Kupang;
- g. Pengisian Kertas Kerja Reviu dalam rangka Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ Triwulan II Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP;
- h. Menghadiri undangan Biro umum dan PBJ dalam rangka pembahasan Usulan Produk Impor pada satker lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 September 2024.
- i. Kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan PBJ lingkup BPPSDMKP TA 2024 oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal III tanggal 21 November 2024 s.d 4 Desember 2024 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.1021/ITJ.3/KP.440/XI/2024;
- j. Pengisian Kertas Kerja Reviu dalam rangka Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ Triwulan III Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP;
- k. Finalisasi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ lingkup BPPSDMKP TA 2024 oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal III di Bogor tanggal 2 s.d 4 Desember 2024;

## **INDIKATOR KINERJA 15**

### **Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)**

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah peraturan perundang-undangan lingkup BPPSDMKP yang telah disampaikan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Periode pengukuran capaian IKU Persentase Penyelesaian Program penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%) adalah per-semester dengan polarisasi maximize.

Tabel 30. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)

IKU-15. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			100	100	100	100	-		

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 100% atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak terjadi penurunan atau tetap. Sedangkan tidak terdapat target pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 tentang Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024, capaian penilaian IKU untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di BPPSDM adalah 100%, dengan rincian peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri KP dengan Judul "Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan", Rancangan telah disampaikan ke Kementerian Hukum dengan

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1475/SJ/HK.160/ XII/2024, tanggal 18 Desember 2024;

2. Peraturan Menteri KP dengan Judul Pedoman Umum Penumbuhan Kelompok, Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan, telah terbit Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri KP dengan Judul Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan. Selain itu telah ditetapkan pula Peraturan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut.
4. Peraturan Menteri KP dengan Judul Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan; dan
5. Peraturan Menteri KP dengan Judul Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan.

Keberhasilan atas pencapaian IKU ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang memberikan arahan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kontribusi dan peran aktif seluruh tim yang bertugas dalam menuntaskan setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu koordinasi, asistensi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain: kerja sama yang terjalin baik antar satuan kerja Eselon I lingkup BPPSDMKP; kerja sama yang baik antara Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tim Harmonisasi

Kementerian Hukum dan HAM; distribusi tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dan sistematis antara Sekretariat BPPSDMKP dan unit kerja pemrakarsa; serta asistensi intensif dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KKP.

## **INDIKATOR KINERJA 16**

### **Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Milyar)**

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Periode pengukuran capaian IKU adalah tahunan dengan polarisasi maximize.

Persentase Realisasi PNBP BPPSDMKP dapat di monitor melalui aplikasi OM SPAN. Rincian realisasi pada aplikasi OM SPAN sebagai berikut:

1. Penerimaan Fungsional berupa pendapatan penjualan hasil pertanian perkebunan peternakan dan budidaya, pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya, pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya, pendapatan biaya pendidikan; pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, Pendapatan royalty atas kekayaan intelektual, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan;
2. Penerimaan umum berupa pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan;
3. Penerimaan BLU berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa pelayanan tenaga pekerjaan informasi pelatihan dan teknologi, pendapatan penyediaan barang, pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pendapatan jasa layanan perbankan BLU,

pendapatan lain-lain BLU, pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan, pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin, pendapatan BLU lainnya dari sewa lainnya.

Tabel 31. Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)

IKU-16. Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
12,56		18,38	32	34,89	50,3	120	56,89		

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 50,3 M atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 34,89 M. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 56,89%. Sedangkan tidak terdapat target pada Renstra Sekretariat BPPSDM. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan Kementerian lain pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Nilai PNBPN (Rupiah Miliar) Tahun 2023

Unit Kerja			
Sekretariat BPPSDM KP		BPPSDM Kementerian ESDM	
Target (Rp. M)	Realisasi (Rp. M)	Target (Rp. M)	Realisasi (Rp. M)
24,7	32,06	209,43	326,25

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian PNBPN di BPPSDM antara lain komitmen yang tinggi dari pimpinan dan didukung kesanggupan satuan kerja terhadap target PNBPN yang telah disepakati bersama. Kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini yaitu keberhasilan BPPSDMKP dalam membentuk satker Badan Layanan Umum.

Dalam rangka pengawalan dan pencapaian target PNBPN yang telah ditetapkan kegiatan pendampingan, asistensi dan monitoring pencapaian dilakukan secara berkala. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan mendukung pencapaian IKU sampai dengan TW IV antara lain: melakukan monitoring pelaksanaan MP III dan pengelolaan PNBPN pada satker Politeknik AUP Kampus Serang dan SUPM Tegal, *focus group discussion* (FGD) kebijakan maksimum pencairan (MP) PNBPN, rapat koordinasi PNBPN lingkup BPPSDMKP dan melakukan koordinasi pemanfaatan pagu PNBPN Tahun 2025 di Kementerian Keuangan.

## **INDIKATOR KINERJA 17**

### **Nilai PNBPN Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Rupiah Miliar)**

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian KKP meliputi penerimaan dari: 1) pemanfaatan sumber daya alam perikanan; 2) pelabuhan perikanan; 3) pengembangan penangkapan ikan; 4) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 5) pemeriksaan/pengujian laboratorium; 6) pendidikan kelautan dan perikanan; 7) pelatihan kelautan dan perikanan; 8) analisis data kelautan dan perikanan; 9) sertifikasi; 10) hasil samping kegiatan tugas dan fungsi; 11) tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi; 12) persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; 13) persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata; 14) perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut; 15) pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; 16) denda administratif; dan 17) ganti kerugian. Seluruh PNBPN yang berlaku pada Kementerian KKP tersebut wajib disetor ke kas negara.

Adapun Pagu PNBPN Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP sebesar Rp653.822.000,00 dan Realisasi PNBPN Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp1.331.724.831,00 (204%).

Tabel 33. Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)

IKU-17. Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Rupiah Miliar)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				0,65	1,33	120			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 1,33 M atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 0,65 M. Indikator ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat target pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian PNBP di BRSDM antara lain komitmen yang tinggi dari pimpinan dan didukung kesanggupan satuan kerja terhadap target PNBP yang telah disepakati bersama. Kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian IKU ini yaitu keberhasilan BRSDM dalam membentuk satker Badan Layanan Umum.

Dalam rangka pengawalan dan pencapaian target PNBP yang telah ditetapkan kegiatan pendampingan, asistensi dan monitoring pencapaian dilakukan secara berkala. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU sampai dengan TW IV antara lain: melakukan pengelolaan PNBP pada satker LRSDKP Bungus, Rapat koordinasi PNBP dan pengelolaan PNBP dan monitoring pelaksanaan maksimum pencairan (MP) III BRPI Sukamandi.

## INDIKATOR KINERJA 18

### Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan

pelatihan serta karantina ikan. Capaian IKU ini diambil dari data Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu, Jumlah Penyuluh Perikanan Swadaya, Jumlah Pengelola Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Jumlah Pusat Pelatihan Mandiri KP dengan target sebesar 12.500 orang pada Tahun 2024. Periode pengukuran capaian IKU adalah tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 34. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (Orang)

IKU-18. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (Orang)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		15.221	12.519	12.500	13.310	106,48	6,32		

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 13.310 Orang atau 106,48% dari target yang ditetapkan sebesar 12.500 orang. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,32%. Sedangkan pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target yang ditetapkan.

Faktor Pendukung Keberhasilan IKU ini adalah adanya pendampingan, asistensi, serta monitoring dan evaluasi dalam bidang:

1. Manajemen Sumber Daya: Perencanaan dan distribusi tenaga kerja yang terarah sesuai kebutuhan unit kerja.
2. Penyuluhan dan Pelatihan Efektif: Peningkatan program berbasis kebutuhan bidang usaha, seperti budidaya, penangkapan, dan pengolahan hasil perikanan.
3. Kolaborasi dan Koordinasi: Sinergi antara pusat, pelatihan, dan UPT eks riset dalam mencapai target IKU.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM berupa pemantauan capaian kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM bersama Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP.

## INDIKATOR KINERJA 19

### Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Orang)

Sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan, tenaga kerja yang dimaksud merupakan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Smart Fisheries Village (SFV). Mereka berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aktivitas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyuluhan, demi mencapai tujuan utama SFV yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

Target awal untuk melibatkan tenaga kerja dalam kegiatan SFV adalah sebanyak 29 orang. Namun, melalui kerja keras dan koordinasi yang baik antar satuan kerja, capaian yang berhasil diraih melampaui target, yakni sebanyak 34 orang. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program SFV.

Tabel 35. Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Orang)

IKU-19. Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Orang)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				29	34	117,24			

Sumber: Aplikasi kinerjaku

Realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2024 sebesar 34 Orang atau 117,24% dari target yang ditetapkan sebesar 29 orang. Indikator ini merupakan IKU baru yang ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Melampauinya target IKU ini didukung oleh beberapa faktor yaitu adanya koordinasi, asistensi, konsultasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tingginya kebutuhan pekerjaan: Kegiatan pembangunan dan pengembangan SFV membutuhkan berbagai jenis keterampilan, sehingga membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup besar.
- Kerjasama antar satuan kerja: Koordinasi yang baik antara BRPL, BRBIH, dan LRBRL dalam mengerahkan sumber daya manusia telah menjadi kunci keberhasilan.
- Kontribusi tenaga kerja: Tenaga kerja yang terlibat telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka, mulai dari pembuatan alat, pembangunan tambak, hingga persiapan fasilitas pendukung.

Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan SFV memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan desa perikanan yang modern dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- Pembuatan alat: Merancang dan membuat berbagai jenis alat yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya perikanan, seperti aerator, pompa air, dan alat panen.
- Pembangunan tambak: Mempersiapkan lahan, menggali kolam, dan membangun infrastruktur tambak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Persiapan fasilitas: Melengkapi SFV dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti ruang pelatihan, tempat pengolahan hasil perikanan, dan pasar.

## **INDIKATOR KINERJA 20**

### **Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)**

Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan) didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama BPPSDMKP yang terbentuk, disepakati, dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Periode pengukuran IKU ini adalah triwulan dengan polarisasi *maximize*. Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah 47 kesepakatan.

Capaian IKU Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan) sebagai berikut:

Tabel 36. Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)

IKU-20. Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
44	82	42	50	47	63	120	26,00	75	84,00

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan) Tahun 2024 sebanyak 61 kesepakatan dari target 47 kesepakatan atau 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 26%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 75 kesepakatan, baru mencapai 84 %.

Pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Peran aktif tim kerja sama di lingkungan BPPSDMKP baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga pusat yang solid dan terorganisir sehingga mampu mengeksekusi strategi dengan baik.
2. Penguatan hubungan dengan mitra sebagai upaya intensif dalam membangun kepercayaan melalui komunikasi yang aktif dan saling mendukung.
3. Inovasi dalam pendekatan kerja sama melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan mitra.
4. Dukungan pimpinan baik di level Kepala UPT, Pusat, hingga Kepala BPPSDMKP.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama pada lingkup BPPSDMKP terbagi kedalam beberapa tingkatan berdasarkan kesepakatan kerja sama yang diperoleh dengan mitra, yaitu kerja sama ditingkat Kepala Badan (eselon I), Sekretariat dan Pusat

(eselon II), serta UPT (eselon III dan IV). Sebagaimana capaian kesepakatan yang diperoleh, sebanyak 66% kegiatan kerja sama berada di tingkat eselon III, 17% ditingkat eselon I, 14% ditingkat eselon IV, dan 3% ditingkat eselon II.

## **INDIKATOR KINERJA 21**

### **Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)**

Kerja sama dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan sektor ini secara berkelanjutan. Hingga saat ini, tindak lanjut atas kesepakatan yang telah disepakati menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dalam capaian persentase realisasi kerja sama.

Tabel 37. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)

<b>IKU-21. Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)</b>									
<b>Realisasi</b>				<b>2024</b>				<b>Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM</b>	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		71,03	76	73	78,87	108,04	3,98		

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati telah terealisasi sebesar 78,87% dari target 73% atau 108%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,98%. Sedangkan pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini meliputi koordinasi yang efektif antarinstansi, dukungan dari pemerintah daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Namun, terdapat pula beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan infrastruktur penyuluhan, yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program. Melalui evaluasi dan perbaikan yang

berkelanjutan, diharapkan kerja sama ini dapat mencapai target 100% dalam waktu yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan SDM kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dalam upaya mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berbagai kerja sama strategis telah dirancang dan diimplementasikan secara kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satu tonggak penting keberhasilan program ini adalah tingginya persentase tindak lanjut dari kerja sama yang telah disepakati. Proses keberhasilan ini diawali dengan identifikasi kebutuhan penyuluhan dan pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan target capaian yang jelas.

## INDIKATOR KINERJA 22

### Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)

Layanan dukungan manajemen internal Sekretariat BPPSDM terdiri dari 10 layanan yang meliputi: (1). Pelayanan Program, (2). Pelayanan Monitoring dan Pelaporan; (3). Pelayanan PNBP; (4). Pelayanan BMN; (5). Pelayanan Keuangan; (6). Pelayanan Hukum dan Advokasi; (7). Pelayanan Kehumasan; (8). Pelayanan Data dan Informasi; (9). Pelayanan Kerjasama; (10). Pelayanan Internal Umum. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%) sebagai berikut:

Tabel 38. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)

IKU-22. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	100	100	100	100	100	100,00		100	100

Sumber: Aplikasi kinerjaku

Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%) Tahun 2024 sebesar 100 % dari target 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tidak terjadi peningkatan atau tetap. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target Renstra telah tercapai 100 %.

Jenis Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDMKP yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 berupa Pelayanan Program, Pelayanan Monitoring dan Pelaporan, Pelayanan PNPB, Pelayanan BMN, Pelayanan Keuangan, Pelayanan Data dan Informasi, Pelayanan Kerjasama, dan Pelayanan Internal-umum.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase layanan dukungan manajemen internal Sekretariat BPPSDM, antara lain disebabkan oleh: Komunikasi yang baik dan rutin dengan unit kerja lingkup BPPSDMKP; Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada ROK yang telah ditetapkan; dan Komitmen penanggung jawab kegiatan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam bentuk ketersediaan dokumen output pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU meliputi 10 layanan dukungan manajemen mulai dari Pelayanan Program sampai dengan Pelayanan Internal Umum yang didukung oleh ketersediaan anggaran.

## **INDIKATOR KINERJA 23**

### **Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)**

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah permasalahan hukum yang di advokasi dan di tangani oleh Sekretariat BPPSDMKP yang berkaitan dengan kepentingan BPPSDMKP berdasarkan Peraturan Menteri KP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan akhir tahun 2023. Kegiatan advokasi hukum diperoleh dari prosentase perhitungan jumlah permasalahan hukum berupa kegiatan konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum yang ditangani dibandingkan dengan permasalahan hukum yang

dimintakan/dimohonkan untuk advokasi baik kepada unit kerja lingkup BPPSDMKP maupun kepada seluruh pegawai aktif maupun yang telah purna tugas.

Berdasarkan matriks permasalahan hukum di lingkungan BPPSDMKP tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Memorandum Nomor 50/BPPSDM.1/OT.120/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, secara garis besar permasalahan yang masuk dan ditindaklanjuti merupakan permasalahan pengadaan barang dan jasa, pembangunan gedung/kantor, dan pemberhentian taruna dengan rincian sebagai berikut:

1. Permasalahan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan akuarium;
2. Pemeriksaan pembangunan gedung asrama taruna;
3. Tindak lanjut somasi terkait pemberhentian taruna; dan
4. Pemeriksaan pengadaan bahan makanan di satuan pendidikan.

Capaian IKU Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%) sebagai berikut:

Tabel 39. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)

IKU-23. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			100	100	100	100			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%) Tahun 2024 sebesar 100 % dari target 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tidak terjadi peningkatan atau tetap. Sedangkan pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud.

Keberhasilan atas pencapaian IKU ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang memberikan arahan dalam setiap tahapan pendampingan permasalahan hukum serta kontribusi dari unit kerja di lingkup BPPSDMKP dan bantuan pendampingan dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain koordinasi dan dukungan yang baik dari pihak-pihak internal KKP yang terkait.

1. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain: Pendampingan oleh Sekretariat BPPSDMKP kepada pegawai BPPSDMKP yang menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum;
2. Pendampingan oleh Sekretariat BRSDM dalam beracara di depan persidangan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung;
3. Pendampingan oleh Sekretariat BRSDM dalam pengosongan dan pengamanan aset tanah dan bangunan rumah negara golongan II; dan
4. Penyusunan materi gugatan, jawaban/kontra memori jawaban, bukti, dan kesimpulan yang dilakukan bersama dan mendapatkan dukungan dari Sekretariat Jenderal KKP, Kejaksaan Agung, Advokat, aparat penegak hukum, serta unit kerja eselon II terkait lingkup BPPSDMKP.

## **INDIKATOR KINERJA 24**

### **Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)**

Indikator Kinerja Utama Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai) merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai) sebagai berikut:

Tabel 40. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)

IKU-24. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
			100	91	100,00	109,89			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM Tahun 2024 sebesar 100 dari target nilai 91. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tidak terjadi peningkatan atau tetap. Sedangkan pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud. Sementara perbandingan Capaian dengan Kementerian lain pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) Tahun 2023

Unit Kerja			
Sekretariat BPPSDM KP		Sekretariat Utama BKN	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
90	90	91	90,19

Sumber: Laporan kinerja tiap unit kerja tahun 2023

Keberhasilan ketercapaian target pada IKU ini tidak terlepas dari bagaimana BPPSDMKP memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk perluasan informasi, seperti instagram, tiktok, facebook. Media sosial memudahkan dalam perluasan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target IKU tersebut meliputi:

1. Pelatihan, Pendampingan atau Monitoring dilaksanakan tanggal 18 September s.d 21 September 2024, bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, Subang – Jawa Barat;
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPID merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik berjalan efektif dan efisien. Tujuan Monev PPID dilakukan sebagai dasar ukur kepatuhan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPPSDMKP, mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi publik;
3. Sosialisasi dan bahan Monitoring PPID akan disiapkan oleh PPID KKP dalam bentuk SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) dan diselenggarakan oleh PPID KKP (tentative Desember 2024) dengan indikator penilaian antara lain kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, digitalisasi;
4. Partisipasi pada Pembahasan Strategi PPID KKP;
5. Kunjungan Lapangan/ Visitasi Ketua Komisi Informasi Pusat Standar Layanan Informasi Publik dan guna mendukung dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024 di Pelaksana UPT BPPP Tegal dan SUPM Tegal, Jawa Tengah;
6. Penilaian kuesioner (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik lingkup BPPSDMKP yang dilaksanakan pada 22-25 November 2024;
7. Partisipasi Forum Konsultasi Publik KKP sebagai media penyebaran Standar Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada stakeholder KP.

## **INDIKATOR KINERJA 25**

### **Indeks Perencanaan Program (Indeks)**

Indeks Perencanaan Program merupakan salah satu komponen perencanaan program dan anggaran lingkup BPPSDM dengan bobot 80%. Perhitungan indeks ini

dilakukan oleh Sekretariat BPPSDMKP melalui lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut: (1). keselarasan kegiatan pada KRISNA Renja BPPSDMKP dengan RKA K/L SAKTI BPPSDMKP; (2). keselarasan kegiatan Renja dengan PK 2024; (3). keselarasan kegiatan Renja 2025 dengan PK 2025; (4). keselarasan Reviu Renstra BPPSDM dengan Renja 2024. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Indeks Perencanaan Program (Indeks) sebagai berikut:

Tabel 42. Indeks Perencanaan Program (Indeks)

IKU-25. Indeks Perencanaan Program									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				80	91,43	114,29			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Indeks Perencanaan Program Tahun 2024 sebesar 91,43 dari target nilai 80. Indikator ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor keberhasilan dari indikator ini adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unit kerja internal Biro Perencanaan maupun eksternal Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan dokumen program dan anggaran tahun 2025 dengan dibuktikan hasil trilateral meeting.

Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya : (1) Melakukan Trilateral Meeting penyusunan Pagu Indikatif pada Renja 2025, RKA K/L 2025 yaitu antara KKP, Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025. (2) Melakukan penyusunan Renja revisi 2024 dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Biro Perencanaan sebagai tim pendamping, revisi Perjanjian Kinerja 2024 dengan

berkoordinasi dengan tim pengelola kinerja Biro Perencanaan dalam penerbitan pengesahan Menteri KKP, dan Revisi Renstra 2020-2024.

## INDIKATOR KINERJA 26

### Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)

Indeks Perencanaan Anggaran merupakan salah satu komponen revisi anggaran di tahun berjalan lingkup BPPSDMKP dengan bobot 80%. Perhitungan indeks ini dilakukan oleh Sekretariat BPPSDMKP melalui lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan komponen penilaian sebagai berikut : (1). Penyelesaian Revisi RKA K/L Unit BPPSDM 2024 ; (2). Kepatuhan usulan Pemutakhiran rencana penarikan dana halaman III DIPA 2024. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulan dengan polarisasi maximize.

Capaian IKU Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks) Tahun 2024, pada tabel berikut :

Tabel 43. Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)

IKU-26. Indeks <b>Perencanaan</b> Anggaran									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				80	96,79	120			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Indeks Perencanaan Anggaran Tahun 2024 sebesar 96,79 dari target nilai 80 atau 120%. Indikator ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor keberhasilan indikator ini adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Kementerian Keuangan terkait revisi RKAKL.

Sementara kegiatan yang menunjang pencapaian diantaranya: menyelesaikan revisi RKA K/L 2024 dengan melakukan koordinasi dengan mitra anggaran yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal III

KKP sebagai mitra BPPSDMKP, dan koordinasi dengan UPT lingkup BPPSDMKP terkait usulan rencana penarikan dana halaman III DIPA 2024.

## INDIKATOR KINERJA 27

### Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)

Perencanaan Strategis merupakan perencanaan dalam penyusunan dokumen kebijakan dan / atau strategis di Lingkungan BPPSDMKP yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Perencanaan Lintas Sektor merupakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan yang terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperlihatkan karakteristik di setiap wilayah sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024.

BPPSDMKP mendukung perencanaan dan pelaksanaan program tersebut melalui kegiatan di bidang pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan dalam pencapaian target-target nasional. Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator keberhasilan perencanaan kegiatan lintas sektor bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini dihitung berdasarkan 3 (tiga) faktor yaitu: kesesuaian target dan indikator renstra dengan rewiu renstra 2024, keselarasan dan kepatuhan renstra BPPSDM terhadap KKP, serta verifikasi kegiatan lintas sektor yang cepat dan akurat.

Tabel 44. Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)

IKU-27. Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				80	93,48	116,85			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor Tahun 2024 sebesar 93,48 dari target nilai 80 atau 116,85%. Indikator ini merupakan IKU yang baru

ditetapkan tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor keberhasilan indikator ini adalah keselarasan antara Renstra BPPSDMKP terhadap KKP dan kegiatan lintas sektor yang didukung oleh BPPSDMKP yang disajikan secara cepat dan akurat.

Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya : (1). Melakukan penyusunan reviu renstra 2024 dan revisi renstra 2020-2024, (2) Melakukan penyusunan target terhadap kegiatan lintas sektor yang terkait dengan BPPSDMKP, diantaranya percepatan pembangunan kawasan perbatasan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, nelayan dan pembudi daya ikan dan petambak garam (KPN), percepatan penghapusan kemiskinan ekstral (PPKE), pengelolaan sampah plastik sektor kelautan dan perikanan.

## **INDIKATOR KINERJA 28**

### **Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)**

Pelayanan Prima/Excellent Service adalah suatu usaha dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan (masyarakat) sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sesuai standar layanan yang telah ditentukan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri, dan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B.1451/SJ.7/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Penyampaian Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan disampaikan bahwa perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitasnya, yaitu dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

BPPSDMKP telah melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dan mendukung mewujudkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;

Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas), pada tabel berikut :

Tabel 45. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Indeks)

IKU-28. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				3,5	4,01	114,57			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM Tahun 2024 sebesar 4,01 dari target nilai 3,5 atau 114,57%. Indikator ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah adanya perencanaan waktu dalam penyusunan proposal, koordinasi antara Pusat dengan UPT dalam pembinaan dan penguatan proposal dan memanfaatkan peluang dalam menyusun Strategi melalui evaluasi proposal.

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan Pelaksanaan PEKPPP yaitu Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPSDM melakukan penilaian mandiri dengan melengkapi Formulir F-02 untuk UPP dan F-03 untuk pengguna/Stakeholders. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Sosialisai PEKPPP Bulan April s.d Mei
- b) Assistensi/pendampingan dilakukan di 5 UPT BPPSDMKP antara lain BRPBAPP Maros, 28 April - 1 Mei 2024, BPPP Ambon, 28 April - 1 Mei 2024, BPPP Bitung, 5-8 Mei 2024, Politeknik KP Pangandaran, 5-8 Mei 2024. Pada lokasi yang sama akan mengundang perwakilan UPP untuk hadir melakukan assistensi oleh Tim Monev Yanlik berdasarkan undangan dari Sekretariat BPPSDMKP; Pengisian LKE PEKPPP dilakukan berdasarkan jenis layanan publik yang tertuang pada Surat Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 348 Tahun 2024 tentang Jenis Layanan Publik Lingkup BPPSDMKP, tanggal 30 Juli 2024 dan atau Kepmen 54 Tahun 202 Tentang Nama dan Produk Layanan Publik lingkup KKP;
- c) Evaluasi PEKPPP dilaksanakan pada bulan November, berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM perihal Penyampaian dokumen Self-Assessment PEKPPP 2024 Nomor B.8215 /BPPSDM.1/HP.430/XI/2024 tanggal 15 November 2024, penilaian PEKPPP UPP dilakukan pada 17 (Tujuh Belas) UPP (Unit Pelayanan Publik) BPPSDMKP Tahun 2024 bersama dengan Inspektorat 3 – Itjen KKP turut mendampingi para tim pemantauan dan evaluasi PEKPPP lingkup BPPSDMKP.

## **INDIKATOR KINERJA 29**

### **Satuan Kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (Satker)**

Konsep Pengelolaan Keuangan BLU tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengukuran IKU ini dilakukan tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas), pada tabel berikut :

Tabel 46. Satuan Kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (Satker)

IKU-29. Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				1,0	1,00	100,00			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU Tahun 2024 sebanyak 1 Satker dari target 1 Satker atau 100%. Indikator ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah adanya rapat-rapat koordinasi, melakukan studi banding ke satker BLU lain, dan FGD dengan satker BLU lingkup Sekretariat BPPSDM dalam rangka penyusunan Rencana Strategi Bisnis.

Sampai dengan akhir tahun 2024, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian IKU ini antara lain identifikasi satker calon BLU serta identifikasi tarif layanan, pembahasan rancangan draft rencana strategi bisnis (RSB) periode 5 Tahun pada Politeknik AUP Jakarta, pemaparan finalisasi rencana strategis bisnis (RSB) 5 Tahunan Politeknik AUP Jakarta dan penyampaian proposal BLU Politeknik AUP sesuai dengan Surat dari Direktur Politeknik AUP Nomor B.7470/POLTEK.AUP/TU.330/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

### INDIKATOR KINERJA 30

#### Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM

Nilai pengawasan kearsipan unit kearsipan BPPSDM bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengukuran IKU ini dilakukan tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Dasar hukum yang dipergunakan adalah Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Adapun nilai yang didapat, diperoleh dari

60 % pengawasan internal dan 40 % pengawasan eksternal. Hal-hal yang menjadi penilaian ANRI yaitu : (1). Pengawasan Internal: a.pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan b. Sumberdaya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana; (2). Pengawasan Eksternal :a.kebijakan; b. pembinaan; c.pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; f. Sumberdaya kearsipan yang meliputi sumberdaya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana serta pendanaan.

Tabel 47. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM

IKU-30. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
				90,0	99,39	110,43			

Sumber: Aplikasi kinerjaku

Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 sebesar 99,39 dari target 90 atau 110,43%. Indikator ini merupakan IKU yang baru ditetapkan tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tidak terdapat pada Renstra Sekretariat BPPSDM.

Faktor – faktor keberhasilan Sekretariat BPPSDMMP dalam mencapai nilai 99.39 adalah hampir pada tiap aspek sekretariat BPPSDMMP mencapai 100% hanya pada aspek penciptaan arsip masih terdapat kesalahan penulisan atau format naskah dinas dan SDM kearsipan yang blm mencapai nilai 100% karena belum seluruhnya SDM Sekretariat BPPSDMMP melaksanakan Diklat teknis. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pendampingan kearsipan di lingkungan BPPSDMMP.

## SASARAN KEGIATAN 2

### Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan "Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM" didukung 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu:

#### INDIKATOR KINERJA 31

#### Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)

Pemenuhan layanan sarana dan prasarana Sekretariat BPPSDM merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja Sekretariat BPPSDM. Sarana dan Prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan pelaksanaan program sehingga diperlukan komitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang termaktub pada Rencana Umum Pengadaan (RUP). Periode pengukuran capaian IKU ini adalah Tahunan dengan polarisasi *maximize*.

Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM, pada tabel berikut :

Tabel 48. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)

IKU-31. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		100	100	100	100	100			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100% atau 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak terdapat kenaikan atau tetap. Sementara pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud.

Faktor mendukung keberhasilan ketercapaian IKU adalah adanya harmonisasi antara perencanaan (melalui aplikasi SIRUP) dengan realisasi di lapangan sehingga seluruh target yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU meliputi pengawasan terhadap ketersediaan alokasi anggaran (menghindari anggaran minus), ketepatan pekerjaan, serta manajemen waktu penyelesaian proyek.

### **SASARAN KEGIATAN 3**

#### **Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM**

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan “Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM” didukung 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu :

#### **INDIKATOR KINERJA 32**

##### **Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)**

Indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan kesekretariatan terhadap pemenuhan hak pegawai. Formulasi yang digunakan untuk penghitungan IKU ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibayarkan tepat waktu. Kategori tepat waktu diimplementasikan dalam bentuk pembayaran gaji yang dilaksanakan pada tanggal pertama hari kerja bulan berjalan. Sementara untuk pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Periode pengukuran IKU ini adalah triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 49. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

<b>IKU-32. Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu</b>									
<b>Realisasi</b>				<b>2024</b>				<b>Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM</b>	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		100	100	100	100	100			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100% atau 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak terdapat kenaikan atau tetap. Sementara pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud.

Pencapaian IKU ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara tim keuangan dengan tim kepegawaian terkait pemutakhiran data presensi pegawai. Dukungan eksternal melalui koordinasi intensif dengan tim KPPN terkait penggunaan aplikasi GPP, Tunjangan kinerja dan aplikasi SAKTI juga berpengaruh terhadap ketercapaian IKU.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain: pemantauan rutin oleh tim kepegawaian terhadap dokumentasi presensi masing-masing pegawai yang dijadikan dasar dalam pemberian besaran Gaji dan Tunjangan Kinerja oleh Tim Kerja Keuangan Sekretariat BPPSDMKP.

### **INDIKATOR KINERJA 33**

#### **Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)**

Layanan Perkantoran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta pelaksanaan tugas Pimpinan pada Sekretariat BPPSDMKP. Suatu ukuran kinerja atas Layanan Perkantoran yang dilaksanakan oleh Sekretariat dalam hal penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran lingkup Sekretariat meliputi : Kebutuhan Sehari hari Perkantoran, Langgan Daya

dan Jasa, serta Pemeliharaan Kantor. Periode pengukuran IKU ini adalah Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.

Tabel 50. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)

IKU-33. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu									
Realisasi				2024				Reviu Renstra Sekretariat BPPSDM	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		100	100	100	100	100			

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

Capaian IKU Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu Tahun 2024 sebesar 100% dari target 100% atau 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 tidak terdapat kenaikan atau tetap. Sementara pada Renstra Sekretariat BPPSDM tidak terdapat target dimaksud.

Keberhasilan pencapaian pemenuhan layanan perkantoran lingkup BPPSDM tepat waktu dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain yaitu 1) Pembayaran operasional perkantoran tepat waktu, 2) Pemeliharaan perkantoran tepat waktu sesuai target, 3) Monitoring rutin dan koordinasi dengan verifikator keuangan terkait keabsahan kuitansi, 4) Koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan secara rutin.

Pada bulan Desember 2024 layanan perkantoran yang telah dilaksanakan yaitu belanja barang persediaan barang konsumsi berupa alat tulis kantor dan bahan komputer, langganan daya dan jasa Kantor BPPSDMKP, langganan listrik, air dan telepon kantor BPPSDMKP Ancol. Jumlah layanan yang direncanakan sebanyak 7 (tujuh) yang meliputi : 1) Kebutuhan sehari-hari perkantoran Sekretariat BPPSDMKP; 2) Langganan Daya dan Jasa Sekretariat BPPSDMKP; 3) Pemeliharaan Kantor Sekretariat BPPSDMKP; 4) Pelaksanaan Operator Kantor; 5) Kebutuhan Sehari-hari

perkantoran BPPSDMKP Ancol; 6) Langganan Daya dan Jasa Kantor BPPSDMKP Ancol; 7) Pemeliharaan Kantor BPPSDMKP Ancol.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, pagu anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 62.048.268.000, dengan anggaran blokir sebesar Rp. 8.751.406.000,- sehingga pagu efektif Sekretariat BPPSDMKP sebesar Rp.52.942.000.000,-. Realisasi anggaran Sekretariat BPPSDMKP sebesar Rp. 50.521.162.811,- atau sebesar 94,79 % terhadap pagu efektif dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 51. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

Akun	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
51	Belanja Pegawai	13.182.000.000	-	3.182.000.000	3.110.235.236	99,46%
52	Belanja Barang	46.466.268.000	7.251.406.000	39.214.862.000	36.576.139.080	93,27%
53	Belanja Modal	2.400.000.000	1.500.000.000	900.000.000	834.788.495	92,75%
Total		62.048.268.000	8.751.406.000	53.296.862.000	50.521.162.811	94,79%

Sumber: Omspan per 31 Desember 2024

Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDMKP pada tahun 2024 dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 94,79 % dari pagu efektif.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat proses pembayaran.

### 3.4. EFISIENSI ANGGARAN SEKRETARIAT BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan.

Dalam rangka Laporan Kinerja BPPSDMKP Tahun 2024 penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Persentase efisiensi anggaran di Sekretariat BPPSDM tahun 2024 per Sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 52. Efisiensi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

NO	SASARAN	NILAI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp.000)	PRESENTASE (%)	EFISIENSI (%)
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	110,6	16.339.862	5.837.651	96,93	13,67
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	100	700.000	43.438	91,92	8,08
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	100	36.257.000	4.040.072	93,89	6,11
		103,53	53.296.862	50.521.162	94,79	8,74

Sumber: Omspan 2024 dan Aplikasi kinerjajaku

Berdasarkan penghitungan per sasaran di atas, terdapat efisiensi anggaran di Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024 adalah sebesar 8,74%

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya

semaksimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Untuk meningkatkan nilai efisiensi terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan prioritas dan mengurangi kegiatan bersifat seremoni.
2. Membagi habis pekerjaan kepada pegawai Sekretariat BPPSDMKP sesuai cascading sehingga dapat meminimalisir ketidaksesuaian pencapaian target dan waktu.
3. Melakukan pengelolaan resiko sehingga permasalahan dapat terdeteksi di awal dan segera diselesaikan sebelum menjadi permasalahan yang lebih berat dan membutuhkan anggaran lebih besar.
4. Pengendalian serta peningkatan ketertiban pegawai dalam implementasi penggunaan dana sesuai rencana, dan atau memperbaharui rencana penggunaan dana apabila terjadi penyesuaian nilai dan waktu penyerapan sehingga realisasi yang direncanakan dengan realisasi sebenarnya bertaut positif yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai efisiensi anggaran.

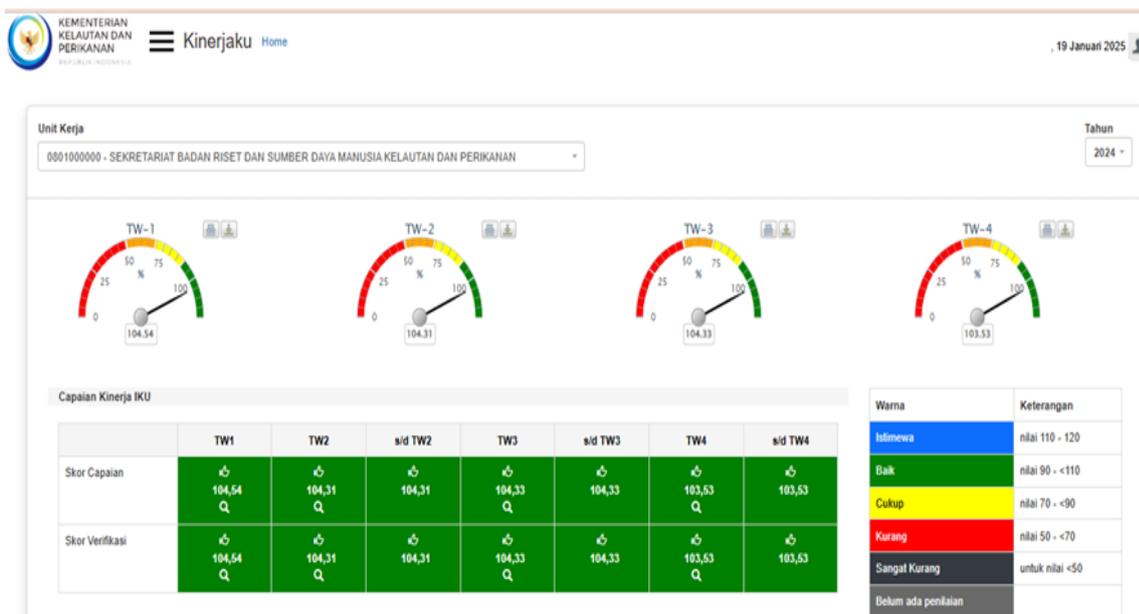


## Bab IV. PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Sekretariat BPPSDMKP pada Tahun 2024, memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan yang meliputi Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM, Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM dan Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM. Sasaran kegiatan tersebut diturunkan menjadi 33 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja (IK) yang setiap IK didukung oleh anggaran yang proporsional.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM Tahun 2024 mendapatkan nilai 103,53, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 102,77 dengan predikat baik, dimana terdapat 16 IKU berkinerja Istimewa dan 17 IKU berkinerja Baik, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

Sumber: Aplikasi kinerjaku

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 53. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2024

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2024	%
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM	17	19	111,76
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM	6	8	120
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM	0,5	0,14	120
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM	85	88,4	104
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM	81	88,79	109,62
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM	94	96,1	102,23
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM	3,3	3,75	113,64
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	94	115,28	120
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM	82	81,31	99,16
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM	76	80,24	105,58
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM	93,76	93,62	99,85
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM	82	99,43	120
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM	80	90	112,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM	80	84,29	105,36
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM	100	100	100
		16	Nilai PNPB Satker BLU dan non BLU BPPSDM	34,89	50,3	120
		17	Nilai PNPB Satker Binaan Sekretariat BPPSDM	0,65	1,33	120
		18	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM	12.500	13.310	106,48
		19	Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM	29	34	117,24
		20	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati	47	63	120
		21	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	73	78,87	108,04

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2024	%
		22	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM	100	100	100
		23	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani	100	100	100
		24	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM	91	100	109,89
		25	Indeks Perencanaan Program	80	91,43	114,29
		26	Indeks Perencanaan Anggaran	80	96,79	120
		27	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor	80	93,48	116,85
		28	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM	3,5	4,01	114,57
		29	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU	1	1	100
		30	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90	99,39	110,43
2.	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	31	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM	100	100	100
3.	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	32	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu	100	100	100
		33	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu	100	100	100

Sumber: Aplikasi kinerjajaku

## 4.2. REKOMENDASI

Secara umum kinerja Sekretariat BPPSDM Pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik, hal ini ditunjukkan dengan peroleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,53% atau di atas 100%. Meski demikian masih terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target yaitu :

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (99,16%)
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (99,85%)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rekomendasi yang disampaikan agar: Capaian kinerja diupayakan lebih baik di tahun 2025 dengan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara sistematis dan berkala dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan.

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brsdm@kkp.go.id](mailto:brsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Riset dan  
SDM Kelautan dan Perikanan

  
**Rudi Alek Wahyudin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BRSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BRSDM (indeks)	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BRSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BRSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BRSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BRSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Nilai PNPB BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500
		18	Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47
		19	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73
		20	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BRSDM (%)	100
		21	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		22	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91
		23	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80
		24	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80
		25	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80
		26	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5
		27	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1
		28	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BRSDM	90
		2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BRSDM	29
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM	30	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100
		31	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BRSDM tepat waktu (%)	100

**Data Anggaran**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BRSDM	62.500.000.000
<b>Total Anggaran Sekretariat Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>62.500.000.000</b>

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Riset dan SDM  
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bppsdm@kkp.go.id](mailto:bppsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

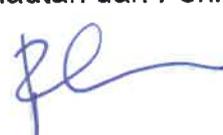
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
Rudi Alek Wahyudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100
		16	Nilai PNBPN Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar) (Rupiah Miliar)	32,134
		17	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		18 Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47
		19 Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73
		20 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100
		21 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		22 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91
		23 Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80
		24 Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80
		25 Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80
		26 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5
		27 Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1
		28 Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	29 Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	30 Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100
		31 Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100

## Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	62.500.000.000
2.	Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir	6.233.730.000
3.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4.523.513.000
4.	Balai Riset Perikanan Laut	5.571.946.000
5.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	6.954.877.000
6.	Loka Riset Perikanan Tuna	6.612.506.000
7.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	11.729.974.000
8.	Balai Riset Pemuliaan Ikan	10.857.446.000
9.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	3.683.042.000
10.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	4.581.931.000
<b>Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>123.248.965.000</b>

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bppsdm@kkp.go.id](mailto:bppsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
**Rudi Alek Wahyudin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	8
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	71
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)	32,134
		17	Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Rupiah Miliar)	0,653
		18	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500
		19	Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (orang)	29
		20	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47
		21	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73
		22	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100
		23	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		24	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91
		25	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80
		26	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80
		27	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80
		28	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5
		29	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1
		30	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	31	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	32	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100
		33	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	63.342.000.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM)	62.045.211.000
<b>Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>125.387.211.000</b>

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brsdm@kkp.go.id](mailto:brsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

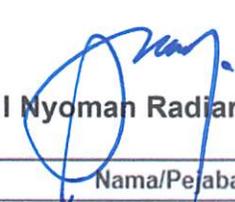
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
**Rudi Alek Wahyudin**

No	Nama/Pejabat	Paraf
1.	KaTimja Program	
2.		



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [brsdm@kkp.go.id](mailto:brsdm@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

  
**I Nyoman Radiarta**

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

  
**Rudi Alek Wahyudin**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM	1	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)	17
		2	Unit kerja yang dibangun untuk diusulkan menuju WBK lingkungan BPPSDM (unit/Satker)	6
		3	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5
		4	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat BPPSDM (indeks)	85
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	81
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat BPPSDM (Nilai)	94
		7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)	3,3
		8	Persentase Unit kerja Sekretariat BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat BPPSDM (%)	82
		10	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)	76
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat BPPSDM (nilai)	71
		13	Tingkat Kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)	80
		15	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPPSDM (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Nilai PNBP Satker BLU dan non BLU BPPSDM (Rupiah Miliar)	34,891
		17	Nilai PNBP Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (Rupiah Miliar)	0,653
		18	Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPSDM (orang)	12.500
		19	Tenaga Kerja yang Terlibat Satker Binaan Sekretariat BPPSDM (orang)	29
		20	Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disepakati (Kesepakatan)	47
		21	Persentase Tindak Lanjut Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	73
		22	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Sekretariat BPPSDM (%)	100
		23	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM yang Ditangani (%)	100
		24	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPSDM (Nilai)	91
		25	Indeks Perencanaan Program (Indeks)	80
		26	Indeks Perencanaan Anggaran (Indeks)	80
		27	Nilai Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor (Nilai)	80
		28	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Lingkungan BPPSDM (Nilai Kualitas)	3,5
		29	Satuan kerja yang diusulkan sebagai satker Badan Layanan Umum /BLU (satker)	1
		30	Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPPSDM	90
2	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BPPSDM	31	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Sekretariat BPPSDM (%)	100
3	Terpenuhinya Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM	32	Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100
		33	Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Sekretariat BPPSDM tepat waktu (%)	100

**Data Anggaran**

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	61.303.268.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM)	59.730.211.000
<b>Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>121.033.479.000</b>

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

No	Nama/Pejabat	Paraf
1.	KaTimja Program	
2.		

### Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	61.303.268.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM)	59.730.211.000
<b>Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024</b>		<b>121.033.479.000</b>

Jakarta, 24 Desember 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta



Pihak Pertama  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

